

# IPK 3,82 Tak Diajui BUMN

## ■ 80 Perguruan Tinggi Swasta di Yogyakarta Tak Kantongi Akreditasi



YOGYA, TRIBUN

- Masyarakat harus kian teliti memilih Perguruan Tinggi Swasta (PTS)

Waktu itu

panitia ngapilih waktu,

kala lupa bawa bisa

disusulkan.

Saya langsung telepon pihak kam-

pus. Ternyata pihak uni-versitas saya belum terakreditasi secara insti-tusi. Saya

akhirnya pas-rah pulang ke Yogyakarta tanpa bisa ikut tes kira-kira.

Yoga tanpa kira-kira ikut tes lanjutan.

"Waktu itu pamitia ngapilih waktu, kalau lupa bawa bisa disusulkan. Saya langsung telepon pihak kam-

pus. Ternyata yang belum terakreditasi institusi, Saiftri, 23 (nama samaran) mengaku lulus kuliah pada 2015 silam dengan IP Kumulatif (IPK) sebesar 3,82. Harapannya dengan nilai kumulatif itu, dia dapat mendaftar kerja ke BUMN atau perusahaan dengan mudah.

"Keluarga saya keuangannya pas-pasan. Berharap bisa kerja di BUMN atau perusahaan bonafit untuk mengangkat ekonomi keluarga. Jadi apa yang saya peroleh bisa gantian bantu ekonomi keluarga," ujar Saiftri kepada *Tribun Jogja*, Rabu (27/4).

Dia pun menceritakan di awal tahun lalu, Samin mendaftar kerja di sebuah perusahaan ternama dan lolos tahap administrasi. Namun saat diundang seleksi wawancara di Surabaya, tiba-tiba Tri tak diperbolehkan mengikuti lamaran tak membawa persyaratan yakni lampiran akreditasi institusi dari kampus.

"Waktu itu pamitia ngapilih waktu, kalau lupa bawa bisa disusulkan. Saya langsung telepon pihak kam-

JAZAH  
IPK 3,82

KRIS BURN

saya dari PTS  
Terkemuka  
di Yogyakarta  
siap memberi  
yang terbaik

maaf nduk,  
kampusmu  
belum  
terakreditasi

sekarang, saya cuma takut ke depan susah cari kerja," ungkap Saiftri.

### Akan ditutup

Terpisah, Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (Aptisi), Budi Djatmiko mengatakan sesuai Undang-Undang (UU) nomor 12/2012, PTS yang tak terakreditasi institusi akan ditutup. Namun PTS masih diberi waktu hingga Agustus 2019 untuk melakukan akreditasi institusi.

"Kalau setelah Agustus 2019 masih ada PTS yang belum terakreditasi akan ditutup, tidak boleh lagi beroperasi. Ini sesuai dengan UU," kata Budi Djatmiko.

Menurut Budi, minimanya PTS yang terakreditasi institusi dikarenakan dana untuk itu dari pemerintah minimal di bawah anggaran

institusi bagi 200 perguruan tinggi, dan akan terus ditingkatkan di tahun selanjutnya.

"Jadi tidak ada alasan lagi, ada PTS yang tidak terakreditasi. Semua perguruan tinggi harus siap diajukan akreditasi," jelas dia.

Sementara itu, Kepala Humas PTS tempat Samin kuliah mengatakan, pihaknya menunda lakukan akreditasi institusi untuk mempermudah dokumen persyaratan. Sehingga ketika dokumen tersebut diajukan, menuai hasil akreditasi yang maksimal.

"Sekarang persaingan PTS di DIY tinggi, akreditasi jadi gengsi. Makanya kami persiapkan secara matang, tapi nanti tetap kami ajukan kok," ujarnya.

di Yogyakarta dari 106 PTS baru 26 yang terakreditasi institusi. Sementara dari 26 PTS yang terakreditasi itu, baru 2 PTS yang memiliki akreditasi A yaitu Universitas Islam Indonesia (UII) dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

"Sementara dari 505 produksi PTS di DIY yang akreditasinya A baru 15 persen, B sekitar 60 persen, dan C baru 25 persen. Ini menjadi tantangan Aptisi untuk meningkatkan," kata Bambang.

Ketua Aptisi DIY, Kasyaryno menyatakan siap memotivasi PTS di DIY untuk mengukuhkan nilai ke-Yogyakartaan untuk meningkatkan kualitas diri. Dia pun akan mendukung visi dan misi DIY untuk men-

## IPK 3,82 Tak Laku di BUMN

• Sambungan Hal 1

pus. Ternyata pihak universitas saya belum terakreditasi secara institusi. Saya akhirnya pasrah pulang ke Yogyakarta tanpa bisa ikut tes anjutan," kenangnya.

Ketika itu, Tri tak lantas menyalahkan universitasnya sepenuhnya. Menengok informasi lowongan kerja di awal tak mencantumkan kreditasi institusi. Namun dia berharap, universitasnya segera mengurus akreditasi institusi karena takut semua perusahaan besar kecepatan mensyaratkannya. "Beruntung sekarang dia bisa bekerja di perusahaan yang tidak mensyarat-